

## **PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022**

**Aurel Alya Natasya<sup>1</sup>, Kartika Rachma Sari<sup>2</sup>, Eka Jumarni Fithri<sup>3</sup>**  
[aurelalya25@gmail.com](mailto:aurelalya25@gmail.com)<sup>1</sup>, [kartikasyahrul@yahoo.co.id](mailto:kartikasyahrul@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [ekajf.2f@gmail.com](mailto:ekajf.2f@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Politeknik Negeri Sriwijaya**

### **Abstrak**

Penelitian tentang pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Ketidak konsistenan hasil penelitian mendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti yang empiris dan memberi literatur baru dengan menguji kembali pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik Sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Sampel Jenuh. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah. Data yang diteliti adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), yang merupakan data time series APBD. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan dalam kurun waktu 2018-2022.

**Kata Kunci:** Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah.

### **Abstract**

*Research on the effect of profit-sharing funds, general allocation funds, special allocation funds and local revenue on government financial performance has been carried out by many researchers. The inconsistency of the research results prompted another study to be carried out. The research aims to obtain empirical evidence and provide new literature by re-examining the effect of profit-sharing funds, general allocation funds, special allocation funds and local original revenues on government financial performance. The type of research method used in this research is quantitative research. The sample technique used in this study is to use a saturated sample. The variables in this study are the government's financial performance, profit-sharing funds, general allocation funds, special allocation funds and local revenue. The data studied is the Revenue and Expenditure Budget (APBD), which is the APBD time series data. Based on the source of data used in this research, it is secondary from the official website of the Directorate General of Balance in the 2018-2022 period.*

**Keyword:** Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Local Own Revenue, Government Financial Performance.

## **1. PENDAHULUAN**

Masa otonomi daerah Negara Indonesia dimulai berlakukannya sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak saat itu, otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang terbaru yang mengatur tentang otonomi daerah adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya Undang- Undang tersebut, pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan segala potensi yang ada di daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut penelitian Amelia Aryanti & Herbirowo Nugroho (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah Tahun 2017-2022 Provinsi Sumatera Selatan memiliki kemandirian rata-rata 63,41% dengan kategori sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan terhadap pendapatan transfer terutama pada dana alokasi khusus non fisik seperti alokasi dana BOS pendidikan dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD, serta meningkatnya perolehan pajak daerah yang berasal dari pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

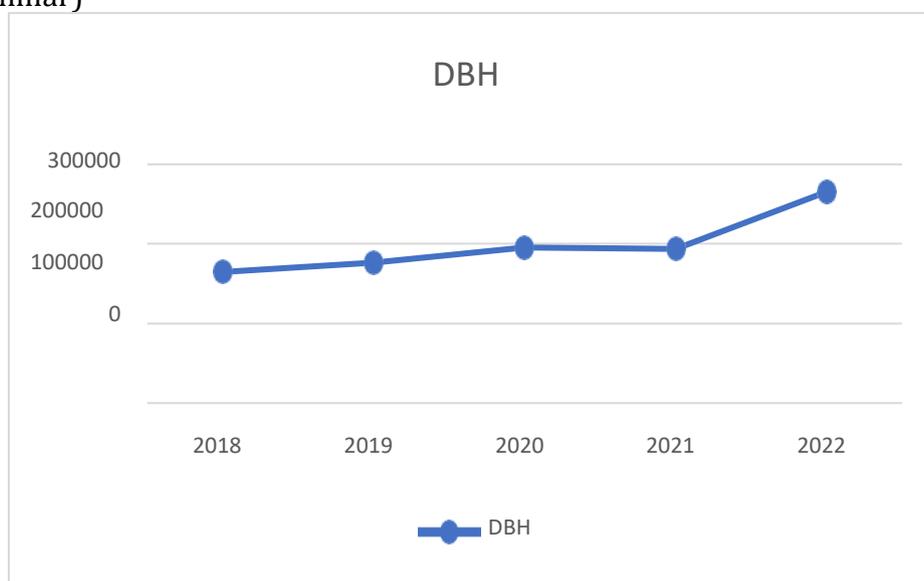
Menurut Sonny Sumarsono (2010: 51) sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan. Keuangan daerah yang dimaksud dalam otonomi daerah berkaitan erat dengan APBD, karena APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. Didalam APBD memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. APBD pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Suhadak dan Nugroho, 2007:8). Dalam rangka peningkatan pelayanan umum yang merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan yang besar agar mampu menunjang segala pemenuhan kebutuhan daerah. Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:51) pendapatan daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan.

Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Menurut Baldrick Siregar (2015:31) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. (Abdul Halim, 2014:134). Dalam APBD, Dana transfer ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dana perimbangan, Menurut Suhadak dan Nugroho (2007: 122) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya apabila apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Secara umum, kondisi mengenai pendapatan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui gambar berikut:  
(dalam miliar)



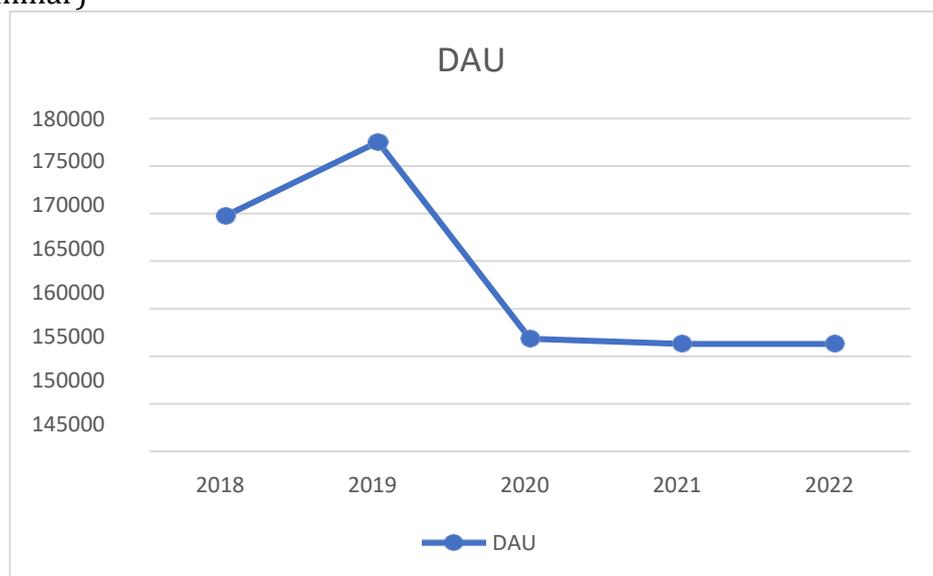
Gambar 1 Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dalam tahun 2018-2022. Secara realisasi dana bagi hasil provinsi sumatera selatan tahun 2018-2022 mengalami peningkatan terjadi peningkatan ini tahun 2021 hingga 2022. Dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa kali mengalami

perubahan dengan adanya refocusing anggaran oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Realisasi penerimaan DAU pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik. (dalam miliar)

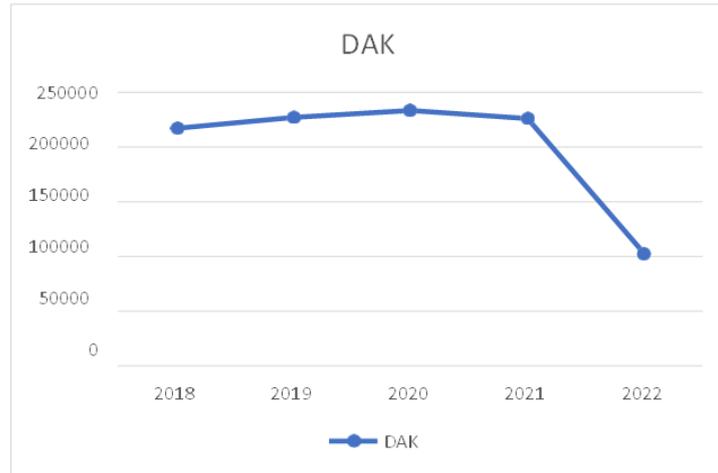


Gambar 2 Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini mengalami kenaikan serta penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, Namun pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan realisasi dana alokasi umum hal ini disebabkan karena cenderung tidak mengalami banyak perubahan selama pandemi sebagai dampak adanya beberapa kali refocusing anggaran oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020). Pandemi covid-19 menjadi pemicu berkurangnya alokasi anggaran dana alokasi umum sehubungan dengan refocusing anggaran terkait penanganan pandemi. Jika dibandingkan dalam pendapatan daerah diwilayah sumatera selatan, Dana alokasi umum setidaknya menyumbang 28,96% dari total pendapatan. Hal ini menggambarkan bahwa daerah Sumatera Selatan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap APBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

(dalam miliar)



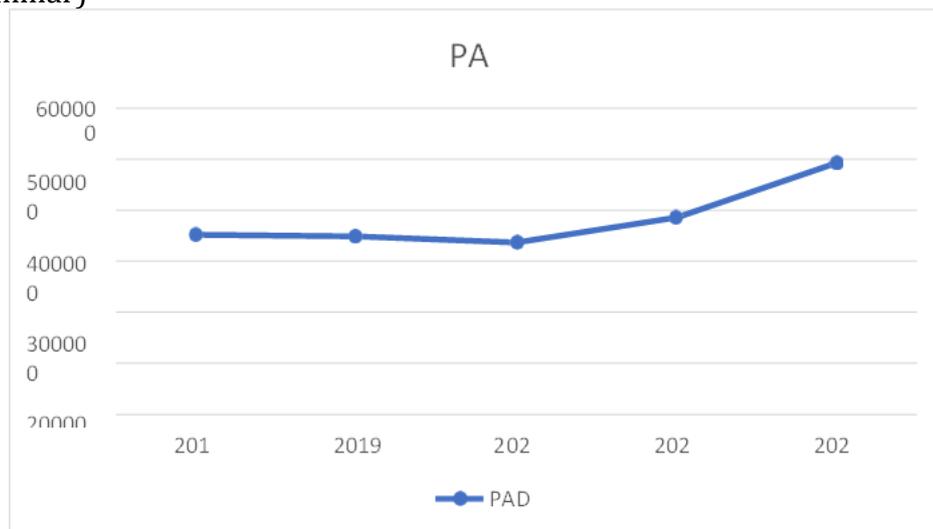
Gambar 3 Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Menurut sumber berita (antaranews.com) Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan mengatakan bahwa saat ini sedang menghadapi kepastian global maka dari itu kinerja APBD perlu didorong guna mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

Menurut Suhadak dan Nugroho (2007: 122) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, kondisi mengenai pendapatan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat melalui gambar berikut:

(dalam miliar)



Gambar 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah peneliti), 2023

Berdasarkan realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 selama ini tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu

dalam tahun 2018-2022, secara rata-rata PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2018-2022) dimana sempat mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 penurunan di tahun 2021 ini disebabkan karena ada nya COVID-19 yang merangsang Pendapatan Daerah saat itu tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan,2020). Akan tetapi, kemudian di tahun 2021 PAD perlahan-lahan mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Sumber realisasi PAD yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pajak Daerah sebesar 4.461,15 M.

Dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan menurut sumber berita (rmolsumsel.id) menyatakan bahwa "APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 ada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana Transfer dan Penguatan PAD dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan Pendapatan. Karena pada tahun sebelumnya kita sempat mengalami defisit anggaran. Kenaikan ini berkisar 700 Miliar dengan rincian PAD dengan kisaran 300 Miliar sedangkan untuk dana transfer sekitar 300 Miliaran".

Pengelolaan dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah yaitu dengan memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan semakin leluasa dan mandiri dalam menggunakan PAD untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tingginya PAD maka daerah dapat memiliki proporsi besar dalam membiayai APBD. Sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Maka dengan kata lain semakin besar PAD maka kinerja keuangan daerah semakin baik.

Pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan besarnya dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus maka pemerintah daerah kurang mandiri karena lebih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan besarnya Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, dan Nurhidayah (2020), Dwi Astarani Aslindar dan Hening Pratika Nila

Hapsari (2022) dan Aprillia Maramis dan Sri Rahayu (2022) dengan memperlihatkan hasil yang berbeda. Ketidak konsistenan hasil penelitian mendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian dilakukan untuk memperoleh bukti yang empiris dan memberi literatur baru dengan menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan data statistik. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif (Ghozali,2018) adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewess (kemencengan distribusi).” Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari data variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1 Hasil Deskripti Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	85	1.57	39.61	13.8704	7.02622
X1	85	108.28	2418.22	443.5360	501.84343
X2	85	291.07	1357.51	613.6128	250.21728
X3	85	84.77	15837.00	415.7708	1695.66976
X4	85	24.66	1158.87	179.3424	237.48263
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat kita peroleh nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi sebagai berikut:

Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 1,57 persen yang diperoleh Kota Palembang pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kota Palembang memiliki nilai kinerja keuangan pemerintah paling rendah pada tahun 2022. Nilai maksimum

yaitu sebesar 39,61 persen yang diperoleh Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah terbesar pada tahun 2022. Nilai rata-rata (mean) provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 sebesar 13,8704 persen dengan standar deviasi sebesar 7,02622. 2.

1. Variabel Dana Bagi Hasil (X1) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 108,28 Milliyar yang diperoleh Kota Pagar Alam pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam memiliki nilai Dana Bagi Hasil paling rendah pada tahun 2021. Nilai maksimum yaitu sebesar 2418,22 Millyar yang diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Dana Bagi Hasil terbesar pada tahun 2021. Nilai ratarata (mean) provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 sebesar 443,5360 Millyar dengan standar deviasi sebesar 501,84343.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 291,07 Millyar yang diperoleh Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir memiliki nilai Dana Alokasi Umum paling rendah pada tahun 2021. Nilai maksimum yaitu sebesar 1357.51 Millyar yang diperoleh Kota Palembang tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palembang memiliki Dana Alokasi Umum terbesar pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 sebesar 613,6128 Millyar dengan standar deviasi sebesar 250,21728.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 84,77 Millyar yang diperoleh Kota Palembang pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kota Palembang memiliki nilai Dana Alokasi Khusus paling rendah pada tahun 2022. Nilai maksimum yaitu sebesar 15837,00 Millyar yang diperoleh Kota Palembang tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palembang memiliki Dana Alokasi Khusus terbesar pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 sebesar 415,7708 Millyar dengan standar deviasi sebesar 1695,66976.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X5) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum sebesar 24,66 yang diperoleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Pendapatan Asli Daerah paling rendah pada tahun 2022. Nilai maksimum yaitu sebesar 1158,87 yang diperoleh Kota Palembang tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 sebesar 179,3424 dengan standar deviasi sebesar 237,48263.

## 2) Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirov Test

N			85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.76448194
Most Extreme Differences	Absolute		.129
	Positive		.129
	Negative		-.068
Test Statistic			.129
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.129 <sup>d</sup>
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.058
		Upper Bound	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Monte Carlo sig (2-tailed) sebesar 0.129 sehingga lebih besar dari 0,05 ( $> 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	30.994	6.409		4.836	.000		
LN_X1	1.425	.610	.159	2.336	.022	<b>.772</b>	<b>1.295</b>
LN_X2	.200	.801	.017	.249	.804	<b>.779</b>	<b>1.284</b>
LN_X3	2.256	.711	.213	3.175	.002	<b>.800</b>	<b>1.251</b>
LN_X4	-8.138	.654	-.972	-12.442	.000	<b>.588</b>	<b>1.700</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Jika nilai tolerance  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  maka hal tersebut menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas pada variabel bebas:

1. Pada variabel X1 (DBH), dapat diketahui nilai toleransi sebesar 0.772 nilai VIF sebesar 1.295. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (DBH) bebas dari multikolinieritas.
2. Pada variabel X2 (DAU) dapat diketahui nilai toleransi sebesar 0.779 dan nilai VIF sebesar 1.284. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (DAU) bebas dari multikolinieritas.
3. Pada variabel X3 (DAK) dapat diketahui nilai toleransi sebesar 0.800 dan nilai VIF sebesar 1.251. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (DAK) bebas dari multikolinieritas.

Pada variabel X4 (PAD) dapat diketahui nilai toleransi sebesar 0.588 dan nilai VIF sebesar 1.700. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel X4 (PAD) bebas dari multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

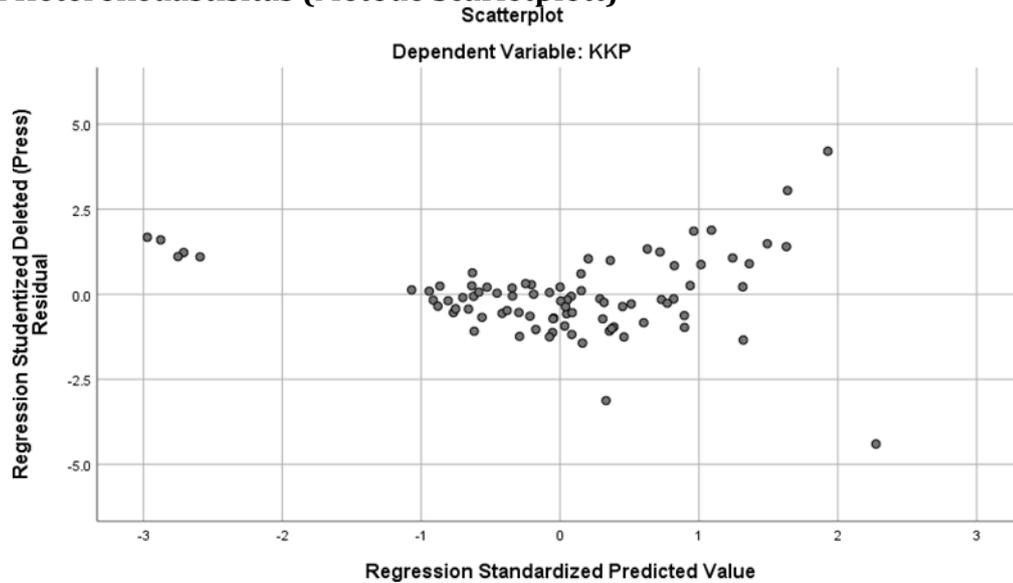
Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.751	3.771		3.116	.003
	LN_X1	-.970	.359	-.309	-2.703	<b>.008</b>
	LN_X2	-.204	.471	-.049	-.433	.666
	LN_X3	.200	.418	.054	.478	.634
	LN_X4	-.663	.385	-.225	-1.722	.089

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Reabs (absolut residual) masih terdapat variabel yang mengalami gejala heteroskedastisitas yaitu variabel X1 (DBH), sehingga dengan metode ini belum diperoleh hasil bahwa seluruh variabel bebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Uji Heterokedastisitas (Metode Scarletplott)



Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan gambar diatas terdapat bentuk pola tertentu menyerupai titik yang membentuk pola yang tertentu secara jelas maka hal ini menunjukkan telah terjadi gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan kedua metode uji heterokedastisitas diatas diketahui bahwa data dalam penelitian ini belum lolos uji asumsi klasik heterokedastisitas, maka dari itu dilakukan penyembuhan menggunakan metode statistic non parametric yaitu:

##### 1. Perbaikan Heterokedastisitas (Kolerasi Spearman Rho)

Agar dapat mengatasi gejala terjadinya heterokedastisitas, langkah yang dilakukan yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan Metode uji Spearman's rho. Dimana dilakukan perhitungan dari korelasi rank spearman antara variable absolut ut dengan variabel-variabel bebas. Kemudian nilai dari semua rank spearman tersebut dibandingkan dengan nilai signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan adalah sebesar 5%.

Tabel 5 Heterokedastisitas (Kolerasi Spearman Rho)  
Correlations

		LN_X1	LN_X2	LN_X3	LN_X4	Unstandardized Residual
LN_X1	Pearson Correlation	1	-.119	.082	.382**	.000
	<b>Sig. (2-tailed)</b>		.277	.453	.000	<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
LN_X2	Pearson Correlation	-.119	1	.250*	.369**	<b>1.000</b>
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.277		.000	.000	<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
LN_X3	Pearson Correlation	.082	.250*	1	.369**	<b>1.000</b>
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.453	.000		.000	<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
LN_X4	Pearson Correlation	.382**	.369**	.369**	1	<b>1.000</b>
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.000	.000	.000		<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
Unstandardized Residual	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.000	.000	.000	.000	<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
		1.000	1.000	1.000	1.000	

		85	85	85	85	85
LN_X2						
LN_X3	Pearson	.082	.252*	1	.432**	.000
	Correlation					
	<b>Sig. (2-tailed)</b>	.453	.020		.000	<b>1.000</b>
	N	85	85	85	85	85
LN_X4	Pearson	.382**	.369**	.432**	1	.000
	Correlation					

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai kolerasi keempat variabel independen tersebut dengan Unstandardized Residual memiliki nilai lebih besar dari 0.05 ( $1,000 > 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

#### Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menguji hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Berikut tabel 4.6 menunjukkan hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.994	6.409		4.836	.000
	LN_X1	<b>1.425</b>	.610	.159	<b>2.336</b>	<b>.022</b>
	LN_X2	<b>.200</b>	.801	.017	<b>.249</b>	<b>.804</b>
	LN_X3	<b>2.256</b>	.711	.213	<b>3.175</b>	<b>.002</b>
	LN_X4	<b>-8.138</b>	.654	-.972	<b>-12.442</b>	<b>.000</b>

a. Dependent Variable: KKP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2023

$$Y = 30.994 + 1.425 \_X1 + 0.200 \_X2 + 2.256 \_X3 - 8.138 \_X4$$

Keterangan:

Y = KKP

X1 = DBH

X2 = DAU

X3 = DAK

X4 = PAD

#### Alasan dilakukannya transformasi data ke dalam logaritma natural:

- Menurut Gujarati (2003) bahwa salah satu alasan dari penggunaan logaritma natural adalah untuk memperkecil nilai variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS (Ordinary Least Square).
- Mengubah skala pengukuran data ke dalam bentuk lain supaya memenuhi asumsi analisis (Mestandarisasi satuan masing-masing variabel).
- Menghindari terjadinya hubungan tidak linier antara variabel independen dengan variabel dependen

Berdasarkan tabel 4.6 output hasil analisis regresi linier berganda, maka diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) = 30.994 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu apabila seluruh variabel independen (DBH, DAU, DAK dan PAD) sama dengan 0 (nol) atau tetap maka variabel dependen yaitu KKP bernilai sebesar 30.994
2. Nilai koefisien regresi untuk DBH (X1) sebesar 1.425 dan memiliki arah hubungan yang positif artinya setiap peningkatan (penambahan) DBH sebesar 1 persen maka variabel KKP (Y) akan meningkat sebesar 1.425 persen, dengan asumsi bahwa variabel DAU, DAK dan PAD dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi untuk DAU (X2) sebesar 0.200 dan memiliki arah hubungan yang positif artinya setiap peningkatan (penambahan) DAU sebesar 1 persen maka variabel KKP (Y) akan meningkat sebesar 0.200 persen, dengan asumsi bahwa variabel DBH, DAK dan PAD dianggap tetap.
4. Nilai koefisien regresi untuk DAK (X3) sebesar 2.256 dan memiliki arah hubungan yang positif artinya setiap peningkatan (penambahan) DAK sebesar 1 persen maka variabel KKP (Y) akan meningkat sebesar 2.256 persen, dengan asumsi bahwa variabel DBH, DAU dan PAD dianggap tetap.
5. Nilai koefisien regresi untuk PAD (X4) sebesar 8.138 dan memiliki arah hubungan yang negatif artinya setiap peningkatan (penambahan) PAD sebesar 1 persen maka variabel KKP (Y) akan menurun sebesar 8.138 persen, dengan asumsi bahwa variabel DBH, DAU dan DAK dianggap tetap.

## 5) Hasil Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

$$\begin{aligned}t \text{ tabel} &= (\alpha/2: n-k-1) \text{ dibagi dua karena berada pada dua sisi hasilnya (ada (+) dan (-))} \\ &= (0,05/2: 85-5-1) \text{ k merupakan jumlah variabel independen + dependen} \\ &= (0,025: 79 \text{ (lihat pada tabel distribusi t)}) \\ &= 1.990\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Variabel X1 (DBH) menunjukkan t hitung sebesar 2.336 sehingga t hitung > t tabel (2.336 > 1.990) dan nilai signifikansi 0.022 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga variabel DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel KKP
- 2) Variabel X2 (DAU) menunjukkan t hitung sebesar 0.249 sehingga t hitung < t tabel (0.249 < 1.990) dan nilai signifikansi 0.804 > 0,05 artinya H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga variabel DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel KKP
- 3) Variabel X3 (DAK) menunjukkan t hitung sebesar 3.175 sehingga t hitung > t tabel (3.175 > 1.990) dan nilai signifikansi 0.002 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga variabel DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel KKP
- 4) Variabel X4 (PAD) menunjukkan t hitung sebesar 12.442 sehingga t hitung > t tabel (12.442 > 1.990) dan nilai signifikansi < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel KKP.

## b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Tabel 7 Hasil Uji Statistik f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2956.497	4	739.124	<b>49.673</b>	<b>.000<sup>b</sup></b>
	Residual	1190.391	80	14.880		
	Total	4146.888	84			

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS, 2023

F tabel = (df1 = k-1; df2 = n-k) k= Jumlah variabel dependen + independen  
 = (df1 = 5-1; df2 =85-5)  
 = (4; 80) (lihat pada tabel distribusi) pada alfa 5%  
 = 2.49

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa diketahui nilai f hitung sebesar 49.67 dan f tabel sebesar 2.49 (F hitung > F tabel) serta taraf signifikan sebesar 0,000 yang mana  $0,000 < 0,05$  sehingga, DBH (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan PAD (X4) secara bersama-sama/Simultan berpengaruh signifikan terhadap KKP (Y).

**6) Koefisien Determinasi**

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 <sup>a</sup>	.713	<b>.699</b>	3.85745

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS, 2023

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square) diperoleh sebesar 0.699. Artinya bahwa variabel KKP (Y) mampu dijelaskan sebesar 69.9% oleh variabel DBH (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) dan PAD (X4). Sedangkan sisanya sebesar 30.1% mampu dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

## 1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dana bagi hasil memiliki koefisien sebesar 1.425 dan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat bahwa menunjukkan t hitung sebesar 2.336 sehingga thitung > ttabel ( $2.336 > 1.990$ ) dan nilai signifikansi  $0.022 < 0,05$  artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga variabel Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan (penambahan) Dana Bagi Hasil sebesar 1 persen maka variabel Kinerja Keuangan Pemerintah akan meningkat sebesar 1.425 persen secara signifikan.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa dana bagi hasil yang merupakan bagian dari dana perimbangan terhadap kinerja daerah dimana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja daerah. Dana bagi merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang berasal dari pajak dan sumber daya alam yang masuk ke pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu sumber pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, DBH berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini

menunjukkan bahwa OPD telah menyalurkan anggaran dan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah dimana dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan bukan penghasil sumber daya alam. Namun alokasi Dana Bagi Hasil bagi pembelanjaan daerah sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan hal ini tidak menjadikan Dana Bagi Hasil yang tinggi akan menurunkan atau meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Rukmana (2013) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, karena Dana Bagi Hasil bagian dari dana perimbangan

yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dana alokasi umum memiliki koefisien sebesar 0.200 dan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat bahwa menunjukkan thitung sebesar 0.249 sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.249 < 1.990$ ) dan nilai signifikansi  $0.804 > 0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga variabel Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Hubungan yang positif tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan (penambahan) Dana Alokasi Umum sebesar 1 persen maka variabel Kinerja Keuangan Pemerintah akan meningkat sebesar 0.200 persen.

Dana alokasi umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh maka semakin kuat ketergantungannya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mencerminkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ini mengindikasikan bahwa OPD dari kabupaten/kota tersebut belum optimal dalam penyaluran alokasi DAU untuk kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas. OPD dari setiap Kabupaten/Kota tersebut harus memastikan pelaksanaan program/proyek yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana, selain itu perlu juga untuk memantau kemajuan dari program dan proyek yang didanai oleh DAU agar pengalokasian anggaran DAU tepat sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maka dari itu pengelolaan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami kenaikan dikarenakan kinerja yang dilakukan sangat baik sehingga dana alokasi umum mempunyai keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Prasasti (2014) dan Rukmana (2013) menyatakan bahwa DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut Prasasti (2014), DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan DAU bagian dari dana perimbangan yang dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan

untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit.

Menurut penelitian Abdullah dkk (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum yang merupakan bagian dari dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dikarenakan terdapat keterikatan pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hamara (2013), Rukmana (2013) dan Prasasti (2014) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum bagian dari dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hasil dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

### 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dana alokasi khusus memiliki koefisien sebesar 2.256 dan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat bahwa menunjukkan thitung sebesar 3.175 sehingga thitung > ttabel ( $3.175 > 1.990$ ) dan nilai signifikansi  $0.002 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan (penambahan) DAK sebesar 1 persen maka variabel Kinerja Keuangan Pemerintah akan meningkat sebesar 2.256 persen secara signifikan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam menjalankan Kebijakan Dana Alokasi Khusus, langkah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus, (iii) arah kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus, dan (iv) administrasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

Perolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Kebijakan DAK sudah diatur oleh kementerian dan lembaga masing-masing bidang dan pemerintah provinsi tidak melakukan pengawasan ke kabupaten/kota terkait DAK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa OPD dari setiap kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan, mampu mengalokasikan DAK yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan prioritas pembangunan daerah. Anggaran DAK diajukan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Faktor yang menyebabkan pengajuan tidak diterima oleh pemerintah pusat dimungkinkan tidak memenuhi syarat atau dianggap bukan merupakan prioritas sehingga pertanggungjawaban DAK telah dilaksanakan

sesuai dengan juknis pengelolaan DAK. Jika terdapat SiLPA DAK maka dianggarkan kembali pada sisi penerimaan pembiayaan dan dianggarkan juga pada sisi belanja. Selanjutnya jumlah SiLPA DAK tersebut dikurangi dengan jumlah DAK yang akan diterima tahun berikutnya. Dana Alokasi Khusus diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi dana alokasi khusus maka akan semakin tinggi kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya pemasukan dana alokasi khusus ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran. Jika kebocoran itu terjadi menunjukkan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah rendah.

Hal ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya sejalan yaitu yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

#### 4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. pendapatan asli daerah memiliki koefisien sebesar -8.138 dan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat bahwa menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 12.442 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $12.442 > 1.990$ ) dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan (penambahan) Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen maka variabel Kinerja Keuangan Pemerintah akan menurun sebesar 8.138 persen secara signifikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari wilayah pemerintahan daerah. Sumber pendapatan asli daerah adalah berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adanya otonomi daerah yang lebih luas yang diterapkan, menjadikan setiap wilayah memiliki kebijakan dalam mengalokasikan sumber pendapatan asli daerah mereka dalam pembangunan daerahnya. Adanya perbedaan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing juga menjadikan alokasi pendapatan asli daerah juga berbeda untuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah mengindikasikan bahwa OPD kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan belum efektif dan efisien dalam mengelola sumber-sumber PAD untuk mendukung tujuan pembangunan daerah

sehingga penggunaannya masih belum tepat maka dari itu belum dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Machmud dan Radjak (2018) yang telah dilakukan sebelumnya. Pendapatan asli daerah tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak menjadi sebuah tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dalam melaksanakan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran daerah yang harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan daerah. Daerah masih mengandalkan penerimaan dalam bentuk lain untuk membiayai pengeluaran daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya ketergantungan dari pendapatan lain yang bukan berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.

#### 5. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (Uji F) pada tabel 4.7 dapat diperoleh bahwa diketahui nilai  $f$  hitung sebesar 49.67 dan  $f$  tabel sebesar 2.49 ( $f_{hitung} > f_{tabel}$ ) serta taraf signifikan sebesar 0,000 yang mana  $0,000 < 0,05$  sehingga, DBH (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan PAD (X4) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap KKP (Y).

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini dikarenakan jika dialokasikan secara bersama-sama dengan maksimal maka dapat meningkatkan pembangunan daerah serta kinerja keuangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul "Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022" maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dengan berpengaruhnya Dana Bagi Hasil maka pengalokasiannya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan sehingga dana bagi hasil dari pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam mendukung keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Dana alokasi umum memiliki peran sebagai sumber pendanaan penting untuk menyokong kegiatan pemerintah daerah. Peningkatan dana alokasi umum mampu memberikan stabilitas fiskal dan mendukung keberlanjutan program-program pemerintah.

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, dikarenakan terjadinya konteks dalam mendukung pembangunan dan program-program khusus. Penelitian ini menemukan bahwa secara efektif mendukung capaian tujuan pembangunan pemerintah daerah dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik.
4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini salah satu penyebab bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan akan tetapi memiliki hubungan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah dikarenakan kurangnya ketercapaian target pendapatan asli daerah dalam kemampuan pemerintah membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah belum optimal, penarikan sumber-sumber pendapatan asli daerah belum optimal dilakukan oleh pemerintah di Sumatera Selatan. Salah satunya kurangnya sumber pendapatan asli daerah dalam kontribusi peningkatan stabilitas keuangan pemerintah daerah.
5. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan dapat diperoleh bahwa diketahui sehingga secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dari variabel-variabel tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kinerja keuangan pemerintah. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya keuangan ini dapat meningkatkan stabilitas, kemandirian dan kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan dan memajukan pembangunan ditingkat daerah maupun nasional. Namun, tetap diperlukannya analisis lebih mendalam untuk memahami dinamika interaksi dan dampak jangka panjang dari komponen-komponen tersebut terhadap keuangan pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2008. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Abdul Halim. 2011. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2016.
- Abdul Halim. 2017. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Anggraeni, Ni Ketut Ayu dan Artini, Luh Gede Sri. 2019. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. E Jurnal Manajemen Unud. Vol 8 No. 3. ISSN 2302-8912. Hal 1315-1345
- Anwar Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Aryanti, A., & Nugroho, H. 2022. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021. In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ (Vol. 3).

- Apridiyanti, A. 2019. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2013- 2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32-41.
- Ardhana, M. A. 2023. Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(1), 84-105.
- Aryanti, A., & Nugroho, H. 2022. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ (Vol. 3)*.
- Aslindar, D. A., & Hapsari, H. P. N. 2022. Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015- 2019. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 37-50.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Febriyanti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 629-637.
- Fernandi Heliyanto & Nur Handayani. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga
- Harjito, Yunus dkk. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol 5 No. 1. ISSN. 2541-0180. Hal 19-28
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.rmolsumsel.id/suntikan-dana-transfer-dan-penguatan-pad-apbd-sumsel-2022-naik-rp700-miliar>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 1-13.
- Kajian Fiskal Regional, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
- Kajian Fiskal Regional, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan kemandirian keuangan Daerah provinsi sulawesi tenggara (Doctoral dissertation, Haluoleo University).
- Machmud, J., dan Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17-32.
- Mahsun., dkk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Maramis, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

- Umum, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020). *eProsiding Manajemen*, 9 (4).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta. Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Edisi Tiga. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPF
- Mudrajad Kuncoro, 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64-77.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105.
- Priyanto, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (ANDI).
- Ramadani, A. F., & Muslimin, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 362-372.
- Rukmana, Van Widi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Hal. 1-15. Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sari, B. I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11.
- Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Faculty of Economics Riau University*. Pekanbaru. *JOM Fekon Vol 3 No 1*.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410-415.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sesotyaningtyas. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal 1 (1) (2012)*. ISSN 2252-6765.

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Suhadak dan Nugroho, 2007, Paradigma Baru (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi), Bayumedia Publishing, Malang.
- Sumarsono, Sonny.2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni dan Adi, Priyo Hari.2009."Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)". Sumber: The 3rd National Conference UKWMS, Page 1, Surabaya.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21-37.